

Analisis Implementasi SIPD RI pada BPPKAD Kota Kediri

Amalia Rahma Hidayat¹, Lilik Purwanti²

^{1,2} Universitas Brawijaya, Indonesia

E-mail: amaliarh@student.ub.ac.id¹, lilik@ub.ac.id²

Article History:

Received: 22 Mei 2026

Revised: 25 Agustus 2026

Accepted: 22 September 2026

Keywords: sistem informasi, implementasi kebijakan, pemerintah daerah, DeLone & McLean, Cooper & Zmud, Edward III

Abstract: Penelitian ini dilatarbelakangi kebijakan penerapan SIPD RI sebagai sistem wajib dalam pengelolaan keuangan daerah yang masih menghadapi berbagai kendala teknis dan operasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses, tahapan, dan tingkat keberhasilan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) di Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus, serta dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan, tahapan implementasi sistem informasi, dan model kesuksesan sistem informasi. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD RI telah melalui seluruh tahapan, mulai dari inisiasi hingga infusi, dengan karakteristik top-down dan mandatory. Keberhasilan didukung oleh sumber daya manusia dan disposisi pelaksana, tetapi terhambat oleh kualitas sistem dan layanan yang belum optimal. Penelitian ini juga menemukan fenomena penggunaan sistem tetap tinggi meskipun kepuasan pengguna rendah, serta muncul praktik kerja paralel sebagai bentuk adaptasi. Secara umum, sistem dinilai cukup berhasil, namun masih memerlukan perbaikan.

PENDAHULUAN

Menurut Andayani dkk. (2024), konsep *good governance* mencakup prinsip-prinsip yang saling berkaitan, seperti akuntabilitas, transparansi, efisiensi, supremasi hukum, partisipasi, daya tanggap, dan visi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Seiring dengan perkembangan teknologi, muncul konsep *e-government* sebagai instrumen penting untuk mendukung implementasi *good governance*. Penerapan teknologi informasi dalam konsep *e-government* berperan sebagai fasilitator dalam memperkuat prinsip-prinsip tata kelola yang baik dengan meningkatkan aksesibilitas informasi dan layanan, menciptakan efisiensi administratif, memperkuat transparansi pemerintahan, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui platform digital sehingga memperkuat akuntabilitas pemerintah (Andayani dkk., 2024). Komitmen pemerintah Indonesia terhadap transformasi digital

diwujudkan melalui kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan kebijakan Satu Data Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transformasi tersebut diwujudkan melalui implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) yang mulai diwajibkan secara penuh pada Tahun Anggaran 2024 melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.5.4/48/SJ Tahun 2023.

Implementasi SIPD RI menjadi penting karena sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga akuntansi dan pelaporan. SIPD RI menggunakan arsitektur *microservices* yang dikembangkan untuk meningkatkan stabilitas sistem, efisiensi pengelolaan data, serta mendukung agenda SPBE dan Satu Data Indonesia (Arif & Firmansyah, 2024). Namun, implementasi SIPD RI di berbagai daerah masih menghadapi banyak kendala. Penelitian Sari dkk. (2024) menunjukkan bahwa implementasi SIPD RI belum berjalan efektif akibat kendala teknis seperti server error, sistem lambat, dan keterbatasan fitur. Arif & Firmansyah (2024) menegaskan bahwa kesiapan implementasi SIPD RI belum merata karena masih terdapat pemerintah daerah yang menggunakan sistem lama seperti SIMDA/FMIS. Penelitian Yanti & Junaidi (2024) menemukan bahwa keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan rendahnya penguasaan teknologi menjadi hambatan implementasi sistem. Annisa (2025) mengidentifikasi adanya kendala fungsional seperti jurnal transaksi yang tidak terbentuk, menu pengembalian belanja yang belum tersedia, dan lambatnya respons helpdesk. Selain itu, Utami & Afriady (2025) mengungkapkan bahwa modul penatausahaan SIPD RI belum optimal sehingga beberapa daerah masih menggunakan sistem ganda, sedangkan Nangoy dkk. (2025) menemukan adanya kendala teknis pada mekanisme pembayaran belanja dan gangguan server. Dinata dkk. (2025) juga menyoroti lemahnya interoperabilitas sistem, belum optimalnya modul administrasi dan akuntansi, serta tidak adanya *steering committee* khusus SIPD RI. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi SIPD RI masih menjadi isu penting karena dapat memengaruhi efektivitas tata kelola keuangan daerah apabila tidak segera diatasi.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Kediri merupakan salah satu pemerintah daerah yang menunjukkan capaian tata kelola yang baik. Pemerintah Kota Kediri berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama sebelas tahun berturut-turut hingga tahun 2024 (Pemerintah Kota Kediri, 2025a). Selain itu, Kota Kediri juga mengalami peningkatan skor Smart City dan berhasil mencapai tingkat kematangan SPIP Level 3 berdasarkan evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 2024 (Diskominfo Kota Kediri, 2024; Pemerintah Kota Kediri, 2025b). Capaian tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Kediri memiliki fondasi tata kelola dan pengendalian internal yang cukup baik. Namun demikian, berdasarkan hasil pra penelitian di BPPKAD Kota Kediri, implementasi SIPD RI masih menghadapi berbagai kendala seperti *server down*, *maintenance* sistem, anomali data, dan lambatnya respons *helpdesk* dari Kemendagri. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan kualitas tata kelola di tengah implementasi sistem informasi nasional yang kompleks. Bahkan di tingkat regional Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menyelenggarakan forum *troubleshooting* SIPD RI untuk membahas berbagai hambatan implementasi di pemerintah daerah (Dinas Kominfo Jatim, 2024; Stranas PK, 2024).

Penelitian terdahulu mengenai implementasi SIPD RI umumnya masih berfokus pada tahap awal implementasi, kesiapan organisasi, dan identifikasi kendala umum sehingga belum mampu menjelaskan secara komprehensif bagaimana implementasi sistem berlangsung dalam

operasional sehari-hari. Sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, teori komponen sistem informasi, atau teori *e-government* Jane E. Fountain (Yanti & Junaidi, 2024; Arif & Firmansyah, 2024; Nangoy dkk., 2025; Annisa, 2025; Utami & Afriady, 2025; Dewi dkk., 2025). Penelitian Sari dkk. (2024) dan Faisal (2025) juga masih bersifat deskriptif eksploratif tanpa kerangka teori yang terintegrasi. Sementara itu, penelitian Sakti (2022) telah menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif dengan menggabungkan teori implementasi kebijakan Edward III, model tahapan adopsi teknologi Cooper dan Zmud, serta model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean, tetapi penelitian tersebut masih berfokus pada SIPD versi lama sebelum transformasi menuju SIPD RI berbasis *microservices*. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi *research gap* dengan menggunakan ketiga pendekatan teori tersebut secara terintegrasi untuk menganalisis implementasi SIPD RI di BPPKAD Kota Kediri secara lebih komprehensif. Pertama, teori implementasi kebijakan dari Edwards III (1980) digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Teori ini relevan karena SIPD RI merupakan kebijakan yang bersifat mandatory dan top-down dari pemerintah pusat, sehingga keberhasilan implementasinya sangat dipengaruhi oleh bagaimana kebijakan tersebut dipahami, didukung, dan dijalankan oleh aparatur daerah. Kedua, penelitian ini menggunakan model implementasi sistem informasi dari Cooper dan Zmud (1990) untuk menjelaskan tahapan adopsi teknologi dalam organisasi, yang meliputi tahap inisiasi, adopsi, adaptasi, penerimaan, rutinisasi, dan infusi. Model ini membantu memahami bagaimana SIPD RI diimplementasikan dan diintegrasikan ke dalam proses kerja organisasi hingga menjadi bagian dari aktivitas operasional sehari-hari. Ketiga, penelitian ini menggunakan Model Kesuksesan Sistem Informasi dari DeLone dan McLean (2003) untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan implementasi SIPD RI melalui enam dimensi, yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih. Integrasi ketiga teori tersebut memungkinkan penelitian menganalisis implementasi SIPD RI tidak hanya dari sisi kebijakan dan proses adopsi teknologi, tetapi juga dari tingkat keberhasilan sistem dalam mendukung kinerja organisasi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis, praktis, dan kebijakan. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akuntansi sektor publik dan sistem informasi melalui integrasi teori implementasi kebijakan George C. Edwards III (1980), teori tahapan implementasi sistem informasi Cooper dan Zmud (1990), serta model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean (2003). Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi BPPKAD Kota Kediri dalam meningkatkan efektivitas penerapan SIPD RI sekaligus menjadi referensi dan bahan pembelajaran bagi pemerintah daerah lain dalam mengimplementasikan SIPD RI secara lebih efektif dan adaptif sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Dari sisi kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian Dalam Negeri dalam mengembangkan dan menyempurnakan SIPD RI agar lebih optimal dalam mendukung tata kelola keuangan daerah. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses dan tahapan implementasi SIPD RI di BPPKAD Kota Kediri berdasarkan teori George C. Edwards III dan Cooper dan Zmud, serta menilai tingkat keberhasilan implementasi SIPD RI menggunakan model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean.

LANDASAN TEORI

E-Government

E-government merupakan pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia usaha, serta antarlembaga pemerintahan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas birokrasi (World Bank, 2002). Fang (2002) menjelaskan bahwa *e-government* memanfaatkan teknologi berbasis internet dan web untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan dan informasi pemerintah secara efektif dan efisien. Heeks (2001) menegaskan bahwa *e-government* tidak hanya berupa digitalisasi administrasi, melainkan pendekatan sistemik baru dalam meningkatkan efektivitas tata kelola sektor publik.

Implementasi *e-government* di Indonesia diperkuat melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Kebijakan tersebut menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung *good governance* melalui peningkatan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas pelayanan publik. Ndou (2004) mengelompokkan *e-government* ke dalam empat dimensi utama, yaitu *Government-to-Citizen* (G2C), *Government-to-Business* (G2B), *Government-to-Government* (G2G), dan *Government-to-Employee* (G2E). Dimensi G2G menjadi dasar pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) karena sistem tersebut dirancang untuk mengintegrasikan pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah secara nasional.

Penerapan *e-government* di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan seperti fragmentasi sistem, rendahnya integrasi data, serta keterbatasan infrastruktur dan keamanan sistem (Hasibuan & Santoso, 2005). Kondisi tersebut mendorong pemerintah mengembangkan SIPD sebagai sistem terintegrasi yang mampu menghubungkan proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan daerah secara elektronik (Tjandra dkk., 2023).

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 mendefinisikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berkualitas. SPBE diselenggarakan berdasarkan prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan.

Konsep utama dalam SPBE adalah integrasi layanan melalui Arsitektur SPBE Nasional yang mencakup integrasi proses bisnis, data, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 juga membedakan aplikasi SPBE menjadi aplikasi umum dan aplikasi khusus. SIPD RI termasuk aplikasi umum yang wajib digunakan oleh seluruh pemerintah daerah untuk mendukung integrasi pengelolaan keuangan daerah secara nasional.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan seluruh proses yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan tersebut bertujuan mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah digunakan untuk mendukung pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Siklus pengelolaan keuangan daerah terdiri atas tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta

pengawasan.

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 menegaskan bahwa penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah wajib dilaksanakan secara elektronik melalui SIPD guna menciptakan integrasi data keuangan daerah secara nasional. Sudianing & Seputra (2019) menyatakan bahwa SIPD menjadi instrumen penting dalam penyediaan data pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi dan terpercaya.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 mendefinisikan SIPD sebagai sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terintegrasi berbasis elektronik. SIPD dikembangkan sebagai implementasi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai integrasi informasi pemerintahan daerah.

Ruang lingkup SIPD meliputi informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya. Informasi keuangan daerah mencakup seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, hingga pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 31 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 mewajibkan seluruh pemerintah daerah mengintegrasikan sistem elektronik daerah ke dalam SIPD. Kebijakan tersebut diperkuat melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.5.4/48/SJ Tahun 2023 yang mewajibkan penggunaan penuh SIPD RI mulai Tahun Anggaran 2024.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan keputusan kebijakan agar menghasilkan dampak nyata sesuai tujuan yang telah ditetapkan (Handoyo, 2012). Edwards III (1980) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi berkaitan dengan kejelasan dan konsistensi penyampaian kebijakan kepada pelaksana. Sumber daya mencakup kesiapan SDM, informasi, anggaran, dan infrastruktur pendukung. Disposisi merujuk pada sikap dan komitmen pelaksana terhadap kebijakan. Struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme organisasi dan prosedur operasional dalam mendukung implementasi kebijakan.

Implementasi SIPD RI merupakan kebijakan *top-down* pemerintah pusat yang diwajibkan kepada seluruh pemerintah daerah melalui Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.5.4/48/SJ Tahun 2023. Analisis implementasi SIPD RI dapat dilakukan melalui empat dimensi Edwards III untuk menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan di pemerintah daerah.

Implementasi Sistem Informasi

Implementasi sistem informasi dipahami sebagai proses perubahan organisasi yang melibatkan interaksi antara teknologi, budaya organisasi, struktur birokrasi, dan perilaku pengguna (da Silva & de Magalhães, 1999). Fichman (1999) menjelaskan adanya *assimilation gap*, yaitu kondisi ketika organisasi telah mengadopsi teknologi namun belum mampu memanfaatkannya secara optimal akibat hambatan pengetahuan dan ketidaksesuaian sistem dengan proses bisnis organisasi.

Cooper dan Zmud (1990) mengembangkan model implementasi sistem informasi yang terdiri atas enam tahapan, yaitu *initiation*, *adoption*, *adaptation*, *acceptance*, *routinization*, dan *infusion*. Tahap *initiation* berkaitan dengan identifikasi kebutuhan teknologi. Tahap *adoption*

mencakup keputusan organisasi untuk mengadopsi sistem. Tahap *adaptation* melibatkan instalasi sistem dan penyesuaian prosedur organisasi. Tahap *acceptance* menunjukkan mulai digunakannya sistem oleh pengguna. Tahap *routinization* terjadi ketika sistem menjadi bagian dari aktivitas rutin organisasi. Tahap *infusion* menunjukkan bahwa sistem telah terintegrasi secara mendalam dan mampu meningkatkan efektivitas organisasi.

Implementasi SIPD RI memiliki karakteristik unik karena proses inisiasi dan adopsinya dipicu oleh kebijakan mandatori pemerintah pusat, bukan murni kebutuhan internal organisasi. Fokus implementasi kemudian terletak pada kemampuan organisasi melakukan adaptasi, penerimaan, rutinisasi, dan infusi sistem ke dalam proses kerja pemerintahan daerah.

Model Kesuksesan Implementasi Sistem Informasi

Evaluasi keberhasilan implementasi sistem informasi dapat dilakukan melalui berbagai model seperti *Theory of Reasoned Action* (TRA), *Technology Acceptance Model* (TAM), *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT), dan *DeLone & McLean Information System Success Model* (Pamungkas dkk., 2020). Model DeLone dan McLean dinilai paling relevan dalam konteks *Government-to-Government* (G2G) karena berfokus pada manfaat dan keberhasilan sistem informasi dalam organisasi pemerintahan.

DeLone & McLean (2003) mengembangkan Information System Success Model (ISSM) untuk mengevaluasi enam dimensi. Dimensi pertama yaitu kualitas sistem (*system quality*) dengan indikator penilaian meliputi kemudahan penggunaan (*usability*), ketersediaan dan waktu respons (*availability & response time*), keandalan (*reliability*), kemampuan integrasi (*interoperability*), serta fleksibilitas dan keamanan sistem. Dimensi kedua, kualitas informasi (*information quality*) dengan indikator penilaian meliputi keakuratan (*accuracy*), kelengkapan (*completeness*), relevansi (*relevance*), ketepatan waktu (*timeliness*), konsistensi (*consistency*), serta format dan kemudahan untuk dipahami (*format & understandability*). Dimensi ketiga yaitu kualitas layanan (*service quality*) meliputi daya tanggap (*responsiveness*), jaminan kompetensi teknis (*assurance*), empati terhadap kesulitan pengguna (*empathy*), serta ketersediaan pelatihan dan pendampingan (*training & support*). Dimensi keempat yaitu penggunaan (*use*) dan niat menggunakan (*intention to use*). Indikator pada dimensi penggunaan (*use*) meliputi frekuensi penggunaan, durasi akses, tingkat penetrasi sistem, serta karakteristik penggunaan (*nature of use*). Sementara itu, niat untuk menggunakan (*intention to use*) mengukur sikap, komitmen, dan dorongan perilaku pengguna untuk terus mengoperasikan sistem. Dimensi kelima yaitu kepuasan pengguna (*user satisfaction*) yang mengukur respons subjektif dan emosional pengguna setelah berinteraksi dengan suatu sistem. Dimensi keenam yaitu dampak/manfaat bersih (*net benefits*) yang merupakan hasil akhir yang menunjukkan sejauh mana implementasi sistem informasi memberikan dampak positif atau kesuksesan, baik bagi individu pengguna (*individual impact*) maupun bagi organisasi secara keseluruhan (*organizational impact*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal holistik (*single-case holistic design*) sebagaimana dikembangkan Yin (2018). Pendekatan ini relevan karena penelitian berfokus pada pertanyaan “bagaimana” dan bertujuan memahami dinamika implementasi SIPD RI secara kontekstual dan mendalam, bukan mengukur hubungan statistik antarvariabel (Creswell & Creswell, 2018). Penelitian ini menggunakan desain *single-case holistic* karena berfokus pada satu kasus utama, yaitu implementasi SIPD RI di BPPKAD Kota Kediri, yang dianalisis secara menyeluruh sebagai satu kesatuan. Meskipun menggunakan beberapa kerangka teori, seperti teori implementasi kebijakan Edward III, tahapan implementasi sistem informasi Cooper dan Zmud, serta Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan

McLean, seluruh teori tersebut digunakan untuk menganalisis satu fenomena yang sama sehingga unit analisis penelitian tetap bersifat holistik. Pemilihan desain ini juga didasarkan pada karakteristik BPPKAD Kota Kediri yang dinilai representatif sekaligus memiliki keunikan kontekstual. Di satu sisi, BPPKAD Kota Kediri merepresentasikan implementasi SIPD RI yang bersifat *mandatory* pada pemerintah daerah, sedangkan di sisi lain instansi ini memiliki kinerja tata kelola keuangan yang baik, ditunjukkan dengan capaian opini WTP 11 kali berturut-turut dan SPIP Level 3. Namun demikian, berdasarkan hasil pra penelitian, implementasi SIPD RI secara penuh sejak tahun anggaran 2023 masih menghadapi berbagai kendala operasional, seperti ketidakstabilan sistem, anomali data, dan lambatnya respons helpdesk pusat. Kombinasi antara kapasitas organisasi yang kuat dan tantangan implementasi sistem baru tersebut menjadikan BPPKAD Kota Kediri relevan untuk dikaji secara mendalam. Pemilihan situs penelitian dilakukan secara *purposive sampling* (Bougie & Sekaran, 2020) dengan mempertimbangkan peran strategis BPPKAD dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai inti implementasi SIPD RI. Informan penelitian juga dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan adalah individu yang dipilih secara sengaja karena mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan perspektif yang kaya dan relevan untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Bougie & Sekaran, 2020). Berdasarkan kriteria tersebut, informan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga tingkatan sebagaimana disajikan pada Tabel 1 untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif.

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Jabatan	Peran Informan	Justifikasi Pemilihan
1	Sugeng Wahyu	Kepala BPPKAD Kota Kediri	Informan Level Strategis	Sebagai pimpinan tertinggi, informan ini merupakan <i>key informant</i> yang memiliki wewenang dan pemahaman menyeluruh terkait pengambilan keputusan strategis, alokasi sumber daya, dan penerimaan kebijakan implementasi SIPD RI (relevan untuk menjawab faktor keberhasilan implementasi kebijakan Edward III dan tahap implementasi sistem informasi Cooper & Zmud).
2	Devi Mutiara	Kepala Bidang Anggaran, Akuntansi dan Verifikasi BPPKAD Kota Kediri	Informan Level Manajerial	Para Kepala Bidang berperan sebagai jembatan antara kebijakan strategis dan pelaksanaan teknis. Mereka memiliki pemahaman mendalam mengenai proses adaptasi alur kerja, pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di bidangnya, dan kendala manajerial yang dihadapi selama implementasi (relevan untuk menjawab faktor keberhasilan implementasi kebijakan Edward III dan tahap implementasi sistem informasi Cooper & Zmud).
3	Ruliari Agustin	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Gaji BPPKAD Kota Kediri		
4	Danang Yusuf	AKPD Ahli Muda Bidang	Informan Level	Informan ini adalah pengguna langsung (<i>end-user</i>) yang secara aktif dan sehari-

No.	Nama Informan	Jabatan	Peran Informan	Justifikasi Pemilihan
		Anggaran, Akuntansi dan Verifikasi BPPKAD Kota Kediri	Operasional	hari mengoperasikan SIPD RI. Kriteria "berperan aktif" menjadi dasar utama pemilihan. Mereka merupakan sumber data primer yang paling penting untuk menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan, mulai dari kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dampak, dan kendala teknis yang dialami (relevan untuk menjawab teori Kesuksesan Implementasi Sistem Informasi Model DeLone & McLean dan tahap implementasi sistem informasi Cooper & Zmud).
5	Misbachul Choirudin	Pelaksana Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan di Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Gaji BPPKAD Kota Kediri		
6	Suji Prayitno	Pelaksana Pengelola Realisasi Laporan Penerimaan Retribusi Daerah di Bidang Pembukuan dan Penagihan BPPKAD Kota Kediri		
7	Sutrisno	AKPD Ahli Muda Bidang Pengelolaan Aset BPPKAD Kota Kediri		

Sumber: Data Penelitian (2025)

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi non-partisipan, serta studi dokumentasi berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), SK/Perwali, dan notulensi Bimbingan Teknis. Data yang dikumpulkan dianalisis secara interaktif dan berkelanjutan menggunakan pendekatan analisis penjadohan pola (*pattern matching*) melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles dkk., 2014 ; Yin, 2018). Validitas dan keabsahan data diuji melalui kriteria *credibility* (dengan triangulasi sumber data dan metode), *transferability*, *dependability*, serta *confirmability* (Lincoln & Guba, 1985).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi SIPD RI di BPPKAD Kota Kediri Berdasarkan Teori George C. Edward III (1980)

Berdasarkan hasil analisis menyeluruh menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edward III (1980), penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) di BPPKAD Kota Kediri mencerminkan sebuah model kebijakan

yang bersifat *top-down* dan *mandatory* (wajib). Secara teoritis, keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh keterpaduan antara komunikasi yang berjalan dengan baik, ketersediaan sumber daya yang memadai, sikap pelaksana yang mendukung, serta struktur birokrasi yang jelas. Namun, dalam praktiknya, implementasi SIPD RI memperlihatkan adanya kesenjangan yang cukup nyata antara kesiapan pemerintah daerah sebagai pelaksana dengan berbagai keterbatasan teknis dan struktural dari pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan.

Pada aspek komunikasi, penyampaian informasi terkait dasar hukum dan kewajiban penggunaan SIPD RI telah dilakukan dengan baik dari pemerintah pusat ke daerah, sehingga mampu membangun kepatuhan terhadap regulasi tanpa kendala berarti. Akan tetapi, pada tahap setelah sistem dijalankan, komunikasi teknis menunjukkan beberapa kelemahan. Ketidakkonsistenan dalam penyampaian informasi terkait pembaruan sistem serta lambatnya respons layanan bantuan (*helpdesk*) dari pihak Kemendagri berpotensi menghambat pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah. Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak sampai mengganggu keberlangsungan implementasi karena BPPKAD Kota Kediri mengambil langkah antisipatif secara mandiri. Keterbatasan komunikasi dari pusat diatasi dengan menyelenggarakan pelatihan internal seperti *Training of Trainers* (ToT) serta melakukan koordinasi langsung dengan pihak Kemendagri ketika menghadapi kendala yang bersifat krusial.

Dari sisi sumber daya (*resources*), implementasi ini menunjukkan adanya kondisi yang bertolak belakang. Di tingkat daerah, dukungan sumber daya sudah sangat baik, baik dari sisi kompetensi sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur seperti jaringan dan perangkat keras, maupun komitmen anggaran daerah yang dialokasikan khusus untuk mendukung operasional SIPD RI. Komitmen terhadap sumber daya finansial ini tidak bersifat sementara, tetapi telah ditetapkan secara formal dalam Rencana Strategis (Renstra) BPPKAD Kota Kediri Tahun 2025–2029. Hal ini tercermin dari adanya alokasi khusus pada Tahun Anggaran 2025 pada kegiatan “Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah” beserta sub-kegiatan “Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah”. Rincian anggaran dan realisasinya disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Rincian Anggaran dan Realisasi Implementasi SIPD RI BPPKAD Kota Kediri TA 2025

Nama Akun	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	137.147.475	134.758.175	98,3%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.570.200	6.517.920	99,2%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.421.900	9.395.928	99,7%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	9.628.400	9.607.605	99,8%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	912.000	880.000	96,5%
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	19.320.000	19.320.000	100,0%
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	58.500.000	58.494.750	100,0%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.665.000	26.483.800	99,3%
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal	16.390.000	16.238.080	99,1%

Nama Akun	Anggaran	Realisasi	Persentase
Computer			
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	596.000	593.850	99,6%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.604.000	11.440.500	90,8%
Total	297.754.975	293.730.608	98,6%

Sumber: Data Dokumentasi BPPKAD Kota Kediri

Berdasarkan Tabel 2 di atas, tingkat serapan anggaran yang nyaris mencapai 100% membuktikan bahwa aktivitas operasional dan pengawalan SIPD di tingkat daerah berjalan dengan sangat intensif. Pengalokasian anggaran pada kegiatan tersebut sejalan dan berkaitan langsung dengan rencana kinerja BPPKAD Kota Kediri yang tercantum dalam Renstra 2025–2029. Pendanaan ini dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan BPPKAD Kota Kediri, yaitu “Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel”, serta sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah”.

Namun, kesiapan yang tinggi di tingkat lokal tersebut masih terkendala oleh keterbatasan infrastruktur dari pemerintah pusat, terutama terkait stabilitas server yang sering mengalami gangguan pada waktu-waktu penting. Selain itu, kebijakan sentralisasi database juga mengurangi kewenangan daerah dalam mengelola data secara mandiri. Kondisi ini menimbulkan ketidakefisienan, karena aparatur daerah harus melakukan pengecekan ulang secara manual menggunakan Excel atau mengolah data lebih lanjut melalui aplikasi lain seperti Tableau untuk memenuhi kebutuhan audit BPK dan analisis pimpinan.

Pada aspek disposisi (*disposition*), temuan di BPPKAD Kota Kediri menunjukkan kondisi yang berbeda dari asumsi awal teori Edward III yang menyatakan bahwa pelaksana cenderung akan menolak kebijakan baru yang dirasa lebih rumit. Meskipun para aparatur mengakui bahwa sistem sebelumnya (SIMDA) lebih sederhana, tidak ditemukan adanya resistensi atau penolakan terhadap penggunaan SIPD RI. Penerimaan ini terjadi karena tidak adanya pilihan lain, di mana pemerintah pusat telah menghentikan penggunaan sistem lama secara sepihak. Ketidadaan opsi ini memunculkan fenomena di mana kepatuhan terhadap aturan yang awalnya bersifat terpaksa secara bertahap berubah menjadi penerimaan dalam praktik kerja sehari-hari. Disposisi yang positif ini didukung oleh komitmen pimpinan daerah dalam mendukung transformasi digital dan keterpaduan data nasional, yang sejalan dengan misi Kota Kediri yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Responsif dan Berintegritas Sehingga Tercipta Masyarakat yang Tertib, Aman, Tentram, Nyaman dan Bahagia”. Selain itu, kedisiplinan juga dijaga ketat melalui sanksi pemotongan TPP serta tekanan pengawasan dari KPK.

Terakhir, pada aspek struktur birokrasi (*bureaucratic structure*), BPPKAD Kota Kediri menunjukkan kemampuan yang baik dalam melakukan penyesuaian internal secara cepat. Penyesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) dilakukan dengan menetapkan pola kerja yang lebih teratur, seperti pembatasan waktu dalam proses input anggaran, serta pembentukan Tim Admin SIPD yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) untuk memastikan koordinasi antarbidang berjalan dengan jelas dan tidak tumpang tindih. Namun, struktur birokrasi yang telah memadai di tingkat daerah ini berbenturan dengan fragmentasi struktur birokrasi di tingkat kementerian pusat. Belum adanya interoperabilitas (integrasi sistem) antara SIPD RI milik Kemendagri dengan aplikasi kementerian teknis lainnya menyebabkan aparatur daerah harus melakukan input data secara berulang (*double entry*). Kondisi ini tidak hanya memperpanjang alur birokrasi, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya ketidaksesuaian data (inkonsistensi

data).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberlangsungan implementasi SIPD RI di BPPKAD Kota Kediri saat ini bukan semata-mata karena kesempurnaan desain kebijakan dari pemerintah pusat. Sebaliknya, sistem ini tetap dapat berjalan karena adanya kemampuan adaptasi, kedisiplinan, dan ketahanan birokrasi di tingkat daerah yang secara aktif mencari solusi mandiri untuk mengatasi berbagai keterbatasan, terutama yang berkaitan dengan kelemahan infrastruktur dan komunikasi dari pemerintah pusat.

Tahapan Implementasi SIPD RI di BPPKAD Kota Kediri Berdasarkan Teori Cooper & Zmud (1990)

Berdasarkan keseluruhan temuan di lapangan yang dianalisis menggunakan teori tahapan implementasi sistem informasi Cooper & Zmud (1990), proses adopsi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) di BPPKAD Kota Kediri telah melalui seluruh tahapan, mulai dari inisiasi hingga infusi. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa setiap tahapan tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan asumsi ideal dalam teori. Hal ini disebabkan karena implementasi SIPD RI berlangsung dalam lingkungan birokrasi pemerintahan yang bersifat terpusat (sentralistik) dan bersifat wajib (*mandatory*), sehingga tahapan proses implementasi sistem tidak didorong oleh kebutuhan internal organisasi, melainkan oleh tekanan regulasi dari pemerintah pusat.

Pada tahap inisiasi (*initiation*) dan adopsi (*adoption*), proses yang terjadi tidak muncul secara alami dari kebutuhan organisasi. Secara teori, inisiasi idealnya bermula dari identifikasi masalah di tingkat bawah (*bottom-up*), yang kemudian diikuti oleh keputusan adopsi berdasarkan pertimbangan rasional manajerial terhadap keunggulan fitur suatu sistem. Namun, di BPPKAD Kota Kediri, inisiasi terjadi karena adanya mandat regulasi dari pemerintah pusat yang bersifat *top-down* untuk tujuan pengendalian, standarisasi nasional, dan percepatan program "Satu Data". Organisasi di daerah kemudian dipaksa masuk ke tahap adopsi melalui fenomena "adopsi paksa". Pimpinan BPPKAD tidak memiliki keleluasaan untuk menolak atau bernegosiasi, mengingat akses terhadap sistem lama (SIMDA dan SIPD Merah Putih) telah dihentikan oleh pemerintah pusat. Terlepas dari fakta bahwa sistem lama dirasa lebih simpel, BPPKAD harus mengadopsi SIPD RI karena ketiadaan sistem substitusi atau alternatif lainnya.

Pada tahap adaptasi (*adaptation*) dan penerimaan (*acceptance*), temuan penelitian memberikan perspektif baru dari penelitian terdahulu. Pada tahap adaptasi, hambatan utama proses transisi tidak berasal dari rendahnya literasi digital atau ketidaksiapan Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah. Sebaliknya, kendala justru berasal dari belum matangnya sistem dari pemerintah pusat, di mana beberapa fitur penting seperti pencairan Tambahan Uang (TU) belum dibuka saat sistem diwajibkan untuk digunakan, sehingga sempat melumpuhkan operasional instansi. Selanjutnya, pada tahap penerimaan, tidak ditemukan adanya penolakan (*resistensi*) dari aparatur. Penerimaan yang tinggi ini didorong oleh fleksibilitas arsitektur SIPD RI yang berbasis *web*, yang memungkinkan akses lintas ruang dan waktu dibandingkan sistem lama yang berbasis desktop, serta kesadaran aparatur untuk mematuhi amanat yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini terdapat pada tahap rutinisasi (*routinization*). Menurut asumsi Cooper & Zmud, penggunaan sistem yang telah menjadi rutinitas seharusnya mampu mengeliminasi pekerjaan manual. Di BPPKAD Kota Kediri, pemahaman kognitif aparatur memang telah mencapai titik rutinitas yang sangat matang, terbukti dari intensitas penggunaan harian tanpa bergantung pada buku panduan. Namun, tingginya intensitas ini justru memunculkan praktik "rutinitas paralel". Hal ini terjadi karena aparatur belum sepenuhnya

percaya terhadap keakuratan proses di dalam sistem, akibat seringnya terjadi *bug* dan anomali data. Akibatnya, mereka tetap melakukan pengecekan dan validasi ulang secara rutin menggunakan aplikasi lain seperti Excel maupun sistem internal seperti Laravel. Praktik ini menunjukkan bahwa rutinisasi di tingkat operasional belum mencerminkan kemapanan teknologi, melainkan bentuk mitigasi risiko atas kelemahan sistem pusat.

Pada tahap akhir, yaitu infusi (*infusion*), SIPD RI telah digunakan secara menyeluruh dan menjadi sistem utama dalam seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Integrasi menyeluruh pada tingkat makro ini semakin diperkuat oleh intervensi pengawasan dari pihak ketiga, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, jika dilihat lebih rinci, tahap infusi ini masih memiliki kelemahan pada tingkat operasional. Aliran data antar modul dalam SIPD RI belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik, yang ditandai oleh seringnya terjadi ketidaksesuaian angka saat data mengalir dari modul penganggaran ke modul penatausahaan atau akuntansi. Kondisi serupa juga terjadi pada aplikasi E-BMD yang meskipun telah terinfusi penuh untuk manajemen kontrol fisik aset secara internal, statusnya masih dibiarkan berdiri sendiri dan belum terhubung secara sistematis dengan SIPD RI.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa tahapan implementasi SIPD RI di BPPKAD Kota Kediri berhasil mencapai titik infusi tertinggi bukan karena keandalan teknologinya semata, tetapi juga oleh dorongan regulasi yang kuat serta kemampuan aparatur daerah untuk beradaptasi, meskipun harus menanggung tambahan beban kerja agar sistem tetap berjalan dengan baik.

Tingkat Keberhasilan Implementasi Sistem Informasi Berdasarkan Model DeLone & McLean (2003)

Berdasarkan keseluruhan temuan di lapangan yang dianalisis menggunakan kerangka Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone & McLean (2003), tingkat keberhasilan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) di BPPKAD Kota Kediri dapat dikategorikan cukup berhasil secara administratif, namun masih belum optimal dari sisi operasional. Evaluasi terhadap enam dimensi dalam model ini menunjukkan adanya ketidasesuaian antara tujuan makro pemerintah pusat dengan pengalaman teknis yang dirasakan oleh aparatur di tingkat daerah.

Pada evaluasi tiga dimensi utama yang membentuk kesuksesan sistem (kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan), implementasi SIPD RI masih menunjukkan beberapa kelemahan yang cukup signifikan. Dari sisi kualitas sistem (*system quality*), SIPD RI memiliki keunggulan dengan menghadirkan kualitas antarmuka (*usability*) berbasis *web* yang mendukung fleksibilitas kerja aparatur. Namun di sisi lain, kualitas sistem menurun akibat rendahnya keandalan infrastruktur (*reliability*) berupa server yang sering mengalami gangguan (*down*), rentannya sistem terhadap *bug* (anomali data ganda atau hilang), serta belum adanya interoperabilitas antar modul maupun antar kementerian.

Secara bersamaan, evaluasi pada dimensi kualitas informasi (*information quality*) juga belum menunjukkan hasil yang optimal. Meskipun output SIPD RI diakui akurat secara regulatif untuk mendukung tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), informasi yang dihasilkan masih bersifat kaku, kurang rinci untuk kebutuhan analisis manajerial sehari-hari, keterlacakan (*traceability*) lemah akibat belum tersedianya register pengajuan TU yang sebelumnya tersedia dalam sistem terdahulu (SIMDA). Akibatnya, aparatur sering merasa ragu dan belum sepenuhnya percaya terhadap data yang dihasilkan secara langsung oleh sistem.

Ketidakoptimalan sistem tersebut semakin diperparah oleh rendahnya kualitas layanan (*service quality*) dari pihak pengembang di pemerintah pusat. Layanan bantuan (*helpdesk*)

terbukti kurang responsif dan tidak efisien karena hanya melalui Whatsapp dan tidak terhubung langsung dengan tim teknis/tim IT sehingga keluhan pengguna di daerah ditampung terlebih dahulu oleh tim admin yang tidak memiliki kapasitas pemecahan masalah teknis. Selain itu, kurangnya sosialisasi teknis pasca peluncuran sistem dan adanya pelimpahan beban perbaikan kesalahan sistem kepada aparatur daerah menunjukkan rendahnya aspek jaminan layanan (*assurance*) dan aspek empati (*empathy*) dari penyedia sistem. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, pemerintah daerah akhirnya harus menggunakan sumber daya internalnya sendiri untuk membangun mekanisme bantuan tambahan secara mandiri, seperti membentuk SK tim monitoring dan evaluasi SIPD dan mengalokasikan anggaran untuk melakukan konsultasi langsung ke Jakarta.

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini yang sekaligus memberikan sudut pandang yang berbeda terhadap asumsi teoritis DeLone & McLean ditemukan pada dimensi penggunaan (*use*) dan kepuasan pengguna (*user satisfaction*). Dalam teori aslinya, tingginya tingkat penggunaan mencerminkan tingginya kepuasan pengguna terhadap kualitas sistem. Namun, dalam konteks birokrasi pemerintahan, hal ini tidak sepenuhnya berlaku. Tingkat penggunaan SIPD RI yang mencapai angka mutlak (100%) bukan disebabkan oleh kepuasan pengguna, melainkan wujud dari kepatuhan terhadap regulasi (*mandatory*) dan ketiadaan sistem substitusi atau alternatif lainnya. Kepuasan pengguna yang muncul bersifat tidak mutlak dan bersyarat, yang secara langsung dinilai sebesar 75/100 oleh pimpinan BPPKAD Kota Kediri. Tingkat kepuasan yang belum maksimal ini disebabkan oleh belum optimalnya aspek kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan yang menghambat pekerjaan sehari-hari. Meskipun demikian, aparatur dapat merasa cukup puas dan mampu menyelesaikan pekerjaannya bukan karena fitur SIPD RI yang sudah optimal, melainkan karena mereka mampu mengatasi kekurangan sistem dengan menggunakan aplikasi pendukung seperti *Excel*, *Tableau*, dan aplikasi internal Laravel.

Pada dimensi akhir yaitu manfaat bersih (*net benefits*), temuan penelitian menunjukkan hasil yang bertolak belakang. Secara makro, SIPD RI memberikan manfaat yang signifikan berupa jaminan keberlanjutan sistem yang lebih baik melalui arsitektur *microservices*, peningkatan transparansi, serta kemudahan pengawasan terpusat yang sejalan dengan program "Satu Data". Namun, di tingkat organisasi, manfaat tersebut diiringi oleh risiko operasional yang nyata. Gangguan teknis pada sistem memicu inefisiensi waktu, memperlambat proses penyerapan anggaran daerah, serta adanya risiko yang berpotensi mengganggu pencapaian opini WTP akibat adanya proses manual di luar sistem.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa mekanisme umpan balik (*feedback loop*) dalam model DeLone & McLean tidak berjalan secara linear di sektor publik. Meskipun manfaat bersih yang dirasakan belum optimal dan kepuasan pengguna terganggu oleh rendahnya kualitas sistem, informasi, dan layanan, kondisi tersebut tidak menurunkan tingkat penggunaan sistem. SIPD RI tetap terus digunakan karena adanya kewajiban hukum dan penerapan sanksi disiplin, sehingga keberhasilan implementasinya lebih mencerminkan keberhasilan dari sisi regulasi dibandingkan keberhasilan dari sisi teknologi itu sendiri.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SIPD RI di BPPKAD Kota Kediri berdasarkan teori George C. Edward III (1980), Cooper dan Zmud (1990), serta Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean (2003). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD RI memiliki karakteristik kebijakan yang bersifat *top-down* dan wajib (*mandatory*). Dari perspektif Edward III, meskipun BPPKAD Kota Kediri telah memiliki sumber

daya, infrastruktur, anggaran, dan komitmen pimpinan yang memadai, implementasi masih menghadapi kendala berupa lemahnya komunikasi teknis dari pusat, ketidakstabilan server, sentralisasi database, dan belum terintegrasinya sistem antar kementerian. Namun, aparaturnya mampu beradaptasi melalui penyesuaian birokrasi internal dan motivasi kerja yang berkembang dari keterpaksaan menjadi kebutuhan.

Berdasarkan teori Cooper dan Zmud (1990), implementasi SIPD RI telah melalui seluruh tahapan mulai dari inisiasi hingga infusi, tetapi tidak sepenuhnya sesuai dengan asumsi teoritis. Tahap inisiasi dan adopsi berlangsung secara paksa karena adanya regulasi pemerintah pusat, sedangkan hambatan pada tahap adaptasi lebih disebabkan oleh ketidaksiapan sistem dibandingkan ketidaksiapan SDM. Pada tahap rutinisasi, penggunaan sistem justru melahirkan praktik kerja paralel menggunakan aplikasi tambahan seperti Excel sebagai bentuk kontrol terhadap kemungkinan kesalahan sistem. Meskipun SIPD RI telah digunakan secara penuh pada tahap infusi, integrasi antar modul maupun dengan sistem lain masih belum optimal.

Sementara itu, berdasarkan Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean (2003), implementasi SIPD RI dapat dikategorikan cukup berhasil tetapi belum optimal. Kelemahan masih ditemukan pada kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan, seperti server yang lambat, bug, informasi yang kurang fleksibel, serta *helpdesk* yang kurang responsif. Tingginya tingkat penggunaan sistem bukan disebabkan oleh kepuasan pengguna, melainkan karena kewajiban regulasi dan tidak adanya alternatif sistem lain. Meskipun SIPD RI memberikan manfaat berupa transparansi dan fleksibilitas kerja, sistem ini juga menimbulkan risiko operasional seperti keterlambatan penyerapan anggaran dan potensi gangguan terhadap pencapaian opini WTP akibat masih adanya proses manual di luar sistem.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SIPD RI di BPPKAD Kota Kediri lebih banyak ditentukan oleh kemampuan adaptasi organisasi daerah dibandingkan kesiapan sistem itu sendiri. Keberhasilan implementasi dalam sistem pemerintahan yang bersifat terpusat dan wajib tidak hanya bergantung pada desain teknologi, tetapi juga pada kualitas komunikasi, dukungan layanan, dan kemampuan organisasi dalam membangun strategi adaptif untuk mengatasi berbagai keterbatasan.

Penelitian ini memiliki implikasi praktis, kebijakan, dan teoritis. Secara praktis, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem informasi sektor publik tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga kesiapan organisasi, kompetensi SDM, dan komitmen pelaksana, sehingga diperlukan pelatihan dan pengembangan kapasitas secara berkelanjutan. Secara kebijakan, pemerintah pusat perlu meningkatkan stabilitas server, fleksibilitas sistem, kualitas layanan teknis, dan integrasi antar kementerian untuk mengurangi duplikasi input data serta meningkatkan efisiensi kerja pemerintah daerah. Secara teoritis, penelitian ini menemukan bahwa hubungan timbal balik (*feedback loop*) dalam model DeLone dan McLean tidak berjalan linear pada sistem pemerintahan yang bersifat wajib. Kualitas sistem dan kepuasan pengguna yang rendah tidak menurunkan tingkat penggunaan karena aparaturnya tetap harus menggunakan sistem demi kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, penelitian ini juga menemukan fenomena baru pada tahap rutinisasi dalam teori Cooper dan Zmud, di mana penggunaan sistem tidak menghilangkan pekerjaan manual, tetapi justru memunculkan praktik kerja paralel menggunakan aplikasi pendukung untuk memastikan keakuratan data.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, proses wawancara dilakukan pada periode akhir tahun anggaran sehingga informan memiliki keterbatasan waktu akibat tingginya beban kerja dan jadwal dinas luar. Kedua, peneliti tidak dapat mengakses langsung sistem SIPD RI karena aturan kerahasiaan data, sehingga hasil penelitian sangat bergantung pada persepsi dan

pengalaman informan. Ketiga, peneliti juga tidak memperoleh akses penuh terhadap dokumen dan laporan keuangan internal yang berkaitan dengan implementasi SIPD RI secara rinci.

Saran

Pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri, perlu meningkatkan kualitas infrastruktur SIPD RI, terutama stabilitas server, kecepatan akses, dan kualitas layanan *helpdesk* agar lebih responsif dan terhubung langsung dengan tenaga teknis. Selain itu, integrasi sistem antar kementerian perlu diperkuat untuk mengurangi praktik *double entry* dan meningkatkan efisiensi birokrasi daerah.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan pendekatan *mixed-methods* agar hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mampu mengukur pengaruh kelemahan sistem terhadap kinerja birokrasi secara lebih objektif. Penelitian berikutnya juga diharapkan melibatkan pihak Kementerian Dalam Negeri atau pengembang aplikasi sebagai informan tambahan untuk memperoleh perspektif teknis yang lebih mendalam dan analisis.

DAFTAR REFERENSI

- Andayani, W., Dahlia, Putrianti, E., Wisdaningrum, O., Putranto, P., & Yanuarisa, Y. (2024). Penguatan Good Governance: Pengalaman Penerapan Electronic Government Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 116–131. <https://doi.org/https://doi.org/10.52005/aktiva.v6i2.240>
- Annisa. (2025). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah terhadap Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Provinsi Riau. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 7619–7635. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.20020>
- Arif, R. N., & Firmansyah, A. (2024). Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah RI (SIPD RI) dalam Proses Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar. *Akuntansiku*, 3(1), 15–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v3i1.630>
- Bougie, R., & Sekaran, U. (2020). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. Wiley.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5 ed.). SAGE Publications, Inc.
- da Silva, R. M. O., & de Magalhães, P. (1999). *The Organizational Implementation of Information Systems: Towards a New Theory*.
- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update. *Journal of Management Information Systems*, 19(4), 9–30. <https://doi.org/10.1080/07421222.2003.11045748>
- Dewi, P. I. M., Widanti, N. P. T., & Dewi, N. D. U. (2025). Analysis of The Regional Government Information System of The Republic of Indonesia (SIPD-RI) in The Preparation of The Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) of Badung Regency, Bali Province. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 23(2), 751–761. <https://doi.org/https://doi.org/10.63309/dialektika.v23i2.644>
- Dinata, R. R., Achmad, M., Maryani, D., & Sartika, I. (2025). Evaluation of Governance of Local Government Information System in Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia. *Syntax Transformation*, 6(6).
- Diskominfo Kota Kediri. (2024, 12 November). Capaian Indeks Pembangunan Statistik Meningkat, Pemkot Kediri Dukung Terwujudnya Satu Data. Diakses dari <https://diskominfo.kedirikota.go.id/information/news/1829>

-
- Diskominfo Provinsi Jawa Timur. (2024, 12 Juni). *Jatim dan KPK Gelar Rakor Troubleshooting Penerapan SIPD RI*. Diakses dari <https://kominformojatimprov.go.id/berita/jatim-dan-kpk-gelar-rakor-troubleshooting-penerapan-sipd-ri>
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Politics and Public Policy Series.
- Faisal, H. (2025). Data and Information Center Planning: the Role of SIPD RI in Achieving Effective and Transparent Governance. *International Journal of Arts and Social Science*, 8, 26–38. www.ijassjournal.com
- Fang, Z. (2002). E-Government in Digital Era: Concept, Practice, and Development. *The Internet and Management*, 10(2), 1–22.
- Fichman, R. G. (1999). *The Diffusion and Assimilation of Information Technology Innovations*.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik* (Mustrose, Ed.). Widya Karya.
- Hasibuan, Z. A., & Santoso, H. B. (2005). Standardisasi Aplikasi E-Government untuk Instansi Pemerintah. *Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia*. <https://www.researchgate.net/publication/301816607>
- Heeks, Richard. (2001). *Understanding E-Governance for Development* (11). Institute for Development Policy and Management.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Sage Publications.
- Menteri Dalam Negeri. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*.
- Menteri Dalam Negeri. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Menteri Dalam Negeri. (2023). *Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 600.5.4/48/SJ Perihal Implementasi SIPD*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3 ed.). SAGE Publications, Inc.
- Nangoy, N. A. M., Tinangon, J. J., & Warongan, J. D. L. (2025). Analysis of the Implementation and Implications of the Regional Government Information System (SIPD) in Regional Financial Management (Study in North Sulawesi Province). *The Contrarian : Finance, Accounting, and Business Research*, 4(1), 29–36. <https://doi.org/10.58784/cfabr.253>
- Pamungkas, A. R., Nugroho, L. E., & Sulisty, S. (2020). Evaluasi Faktor Kegagalan Sistem Informasi pada Kesiapan Penerapan E-Government: Studi Literatur. *JIKO (Jurnal Informatika dan Komputer)*, 3(3), 143–152. <https://doi.org/10.33387/jiko>
- Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*
- Pemerintah Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*.
- Pemerintah Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Pemerintah Indonesia. (2019). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia*.
- Pemerintah Kota Kediri. (2025a, 2 Mei). *Kota Kediri Raih Opini WTP Sebelas Tahun Beruntun, Komitmen Mbak Wali Wujudkan Kota Kediri MAPAN*. Diakses dari <https://www.kedirikota.go.id/p/berita/10113103/kota-kediri-raih-opini-wtp-sebelas-tahun-beruntun-komitmen-mbak-wali-wujudkan-kota-kediri-mapan>
- Pemerintah Kota Kediri. (2025b, 8 Agustus). *Mbak Wali Mantapkan Komitmen Good Governance, Gelar Workshop Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi*.

- Diakses dari <https://www.kedirikota.go.id/p/berita/10113354/mbak-wali-mantapkan-komitmen-good-governance-gelar-workshop-penilaian-maturitas-penyelenggaraan-sipd-terintegrasi>
- Pemerintah Kota Kediri. (2025). *Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029*.
- Sakti, G. P. (2022). *Analisis Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Barat)*. Universitas Gadjah Mada.
- Sari, C. F., Wulandari, E., & Nugraheni, A. P. (2024). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang. *Jurnal Akuntansi, Auditing, dan Perpajakan*, 6(1), 93–109. <https://jom.untidar.ac.id/index.php/jaap>
- Stranas PK. (2024). Stranas PK Fasilitasi Penanganan dan Penyelesaian Kendala Penerapan Aplikasi SIPD RI di Wilayah Jawa Timur. Diakses dari <https://stranaspk.id/publikasi/berita/stranas-pk-fasilitasi-penanganan-dan-penyelesaian-kendala-penerapan-aplikasi-sipd-ri-di-wilayah-jawa-timur>
- Sudianing, N. K., & Seputra, K. A. (2019). Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Menunjang Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah. *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, 11, 112–133.
- Tjandra, R., Harjanto, N., Nurim, Y., & Wijaya, N. R. (2023). The Determinants of Local Government Information Systems Effectiveness. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 13(3). <https://jogja.tribunnews>.
- Utami, M. N., & Afriady, A. (2025). Analysis of SIPD Implementation at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Cimahi City Based on Home Affairs Ministerial Regulation No. 70 of 2019. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi*, 17(1), 2085–5230. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v17i1.6617>
- World Bank. (2002). *The E-Government Handbook for Developing Countries: A Project of InfoDev and The Centerfor Democracy & Technology*. infoDev. <http://www.infodev.org>.
- Yanti, U., & Junaidi. (2024). Tinjauan atas Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Transisi SIPD ke SIPD RI pada BPKAD Mojokerto. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 8(3), 28–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v8i3.4395>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications* (Sixth Edition). SAGE Publications, Inc.